

MEWUJUDKAN CITARUM HARUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR BANTARAN SUNGAI

Agus Setiaman

Email :agus.setiaman@unpad.ac.id

ABSTRAK. Pola pembangunan yang berorientasi pada masyarakat maka titik tekan ada pada pemberdayaan dimana pengalaman nyata masyarakat dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal pembangunan itu sendiri. Dengan daya inisiatif, dan daya kreasi serta daya imajinasinya warga masyarakat menempatkan diri sebagai sumber daya pembangunan, pembangunan materi bukan pusat dari semua pembangunan yang dilaksanakan akan tetapi pembangunan spiritual juga menjadi pusat perhatian dalam membangun masyarakat, dengan demikian pembangunan menghendaki keseimbangan antara pembangunan material dan pembangunan spiritual.

Kekuatan-kekuatan potensial yang dimiliki individu dan organisasi atau kelompok-kelompok sosial yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat mendukung penyebaran kegiatan pembangunan yang dilakukan, antara lain dalam penyebaran difusi dan inovasi. Hal yang harus diperhatikan dalam hal ini pencapaian tujuan pembangunan tidak akan berhasil secara optimal manakala suatu sistem pembangunan tidak di dukung oleh partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

Komunikasi pemberdayaan merupakan proses komunikasi yang tujuannya adalah terjadinya tumbuh kembang motivasi dan kesempatan warga masyarakat memiliki saluran komunikasi sehingga warga masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kajian komunikasi pemberdayaan masyarakat berfokus pada komunikasi pembangunan yang mendorong dan memotivasi kegiatan pembangunan dengan melibatkan warga masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian seluruh proses komunikasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat memfokuskan pada komunikasi yang bersifat dialogis, interaktif dan bersifat dua arah. Dalam pemberdayaan masyarakat, berbagai kegiatan atau proyek pembangunan lebih menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki berbagai sisi kemanusiaannya, baik berupa keinginan, cita-cita, daya, nilai-nilai, budaya dan peradaban, dan sebagainya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan, Partisipasi, Masyarakat

REALIZING CITARUM HARUM THROUGH EMPOWERING COMMUNITIES AROUND THE RIVERBANKS

ABSTRACT. The pattern of community-oriented development, the pressure point is on empowerment where the real experience of the community in carrying out development is the capital of development itself. With the power of initiative, and the creative power and imagination of the community citizens place themselves as development resources, material development is not the center of all development carried out but spiritual development is also the center of attention in building society, thus development requires a balance between material development and spiritual development.

The potential forces possessed by individuals and organizations or social groups living in society are expected to support the spread of development activities carried out, among others in the spread of diffusion and innovation. Things that must be considered in this case the achievement of development goals will not succeed optimally if a development system is not supported by community participation as the subject of development itself.

Empowerment communication is a communication process whose goal is the growth and development of motivation and opportunities for community members to have communication channels so that community members get a better life. Community empowerment communication studies focus on development communication that encourages and motivates development activities with the involvement of as many community members as possible. Thus, the entire communication process in the context of community empowerment focuses on communication that is dialogical, interactive and two-way. In community empowerment, various development activities or projects place the community as subjects who have various sides of humanity, both in the form of desires, ideals, powers, values, culture and civilization, and so on.

Keywords: empowerment, development, participation, community

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara geografis wilayah Jawa Barat sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan dataran tinggi, sehingga banyak memiliki sungai baik sungai besar yang melintasi beberapa

wilayah kabupaten bahkan melintasi provinsi, dan tidak sedikit pula warga masyarakat yang hidup dan menghidupi dirinya tergantung pada sungai yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa sungai yang terkenal di Jawa Barat antara lain sungai Citarum, Sungai Citanduy,

Sungai Ciseel, Sungai Citarik, Sungai Ciliwung, Sungai Cimandiri, dan lain sebagainya.

Sungai telah menjadi bagian esensial bagi warga tanah Pasundan hal ini bisa terlihat dari penamaan sungai yang diawali dengan kata “ci” yang berarti air yang merupakan sumber kehidupan. Seluruh kawasan sungai di Jawa Barat sesungguhnya memiliki potensi luar biasa baik ekosisten lingkungan maupun potensi pengembangan wisata air bahkan pengembangan sosial budaya yang menarik.

Pertumbuhan dan laju pembangunan ekonomi serta pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada tingginya alih fungsi sungai dan kawasan sekitar sungai yang semula merupakan kawasan konservasi atau bantaran berubah menjadi kawasan pemukiman dan aktifitas ekonomi yang lain. Dan lebih parahnya lagi sekian tahun proses alih fungsi seolah dibiarkan terkesan di maklumi atau bahkan seolah mendapat “restu”. Pemukiman di sekitar bantaran sungai semakin padat, sungai berubah menjadi semacam tempat pembuangan sampah akhir, air sungai berubah menjadi hitam bahkan bau tidak alang kepalang.

Warga sekitar sungai sepertinya tidak lagi menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan, tidak lagi menganggap bahwa sungai memberikan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung untuk kehidupannya. Disisi lain warga mulai merasa dan mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih, saat musim penghujan air sungai meluap ke pemukiman, sungai tidak lagi mampu menampung debit air yang melimpah, bencana banjir melanda di kawasan bantaran sungai dan warga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan ikan di sungai yang ada disekitarnya.

Keprihatinan yang mulai tumbuh dan berkembang serta kesadaran pentingnya fungsi sungai merupakan salah satu syarat penting dalam proses penataan kawasan bantaran sungai dengan melibatkan peran seluruh kelompok kepentingan kawasan bantaran sungai mulai dari pemerintah pusat, daerah, warga masyarakat sekitar sungai, para tokoh masyarakat, aparat keamanan, para pemuda, para pendidik, tokoh agama. Pelibatan stakeholder mulai dari tahap perencanaan hingga operasional dan evaluasi. Partisipasi masyarakat merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan kawasan sungai sehingga pemberdayaan mutlak diperlukan dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi hal utama.

2. Kajian Literatur

2.1. Pembangunan

Sesuai dengan paradigma kebijakan pembangunan desentralisasi dimana pembangunan itu subjek dan pemilik pembangunan tidak lain adalah rakyat sendiri. Dalam paradigma pembangunan seperti ini kapasitas rakyat yang mandiri, serta kemampuan dalam melakukan kontrol internal atas sumberdaya yang bersifat materi dan non materi. Paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat menghendaki tumbuh kembang pemberdayaan dimana daya kreasi, kreatifitas merupakan modal utama untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

Terjadinya pergeseran paradigma pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini pemerintah tidak lagi menempatkan diri sebagai pelaksana pembangunan melainkan sebagai penyelenggara pelayanan *social (social services provider)* pemerintah menematkan diri sebagai perantara, menjadi fasilitator, melakukan koordinasi, memberikan pembelajaran serta peran lain yang bersifat layanan kepada warganya. Pola pembangunan yang menekankan inisiatif pembangunan berasal dari masyarakat (*bottom-up*), yang menekankan pembangunan berdasar kebutuhan nyata warga masyarakat, yang mengetahui kebutuhan dan harapan yang diinginkan adalah warga masyarakat sendiri. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan dari, oleh dan untuk warga masyarakat sendiri.

Berdasar paradigma pola pembangunan yang bersifat *bottom-up* dimana pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk maka kunci pembangunan ada pada pemberdayaan karena merumuskan, menetapkan dan melaksanakan serta memelihara hasil pembangunan tiada lain adalah warga masyarakat itu sendiri.

2.2. Strategi Kebijakan Pembangunan

Perkembangan teori - teori pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kini mulai bergeser pada pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Korten* dan *Carner* dalam Hary Hikmat (2001:94) menyatakan secara sederhana bahwa pembangunan yang berorientasi pada laju pertumbuhan ekonomi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (a) Menekankan sector industry bukan sector pertanian padahal negara-negara berkembang sebagian besar bermatapencapaian di sector pertanian.
- (b) Pembangunan berpusat di kota bukan desa
- (c) Kepemilikan pada aset produksi oleh pihak tertentu bukan pada banyak pihak.

- (d) Investasi pembangunan menguntungkan kelompok terbatas, tidak untuk setiap kelompok.
- (e) Menekankan pada optimalisasi penggunaan modal tidak pada optimalisasi sumberdaya manusia.
- (f) Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara besar-besaran dan seringkali merusak lingkungan bahkan menghancurkan sumber daya hayati yang lain. Eksploitasi sumberdaya alam ini digunakan untuk jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.
- (g) Menekankan pada perusahaan skala besar, perusahaan nasional, bahkan transnasional yang menghasilkan perekonomian global, akan tetapi kurang adaptif dan rawan gangguan guncangan ekonomi global.

Berhubungan dengan hal tersebut *Karten* dan *Carner* mengemukakan tiga tema penting dalam pembangunan yang berorientasi pada rakyat antar lain:

1. Menekankan pada usaha mandiri golongan miskin untuk dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Pada kelompok rumah tangga miskin maka sector tradisional adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi secara konvensional,
3. Munculnya kesadaran pentingnya lembaga yang bisa membantu meningkatkan keterampilan bagi para penerima bantuan kelompok miskin agar dapat mandiri dan mampu mengelola sumber daya lokal.

2.3. Komunikasi Pembangunan Era Otonomi Daerah

Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, pada era desentralisasi atau otonomi daerah sekarang ini, konsep-konsep pembangunan yang ada dan diterapkan di Indonesia pada dasarnya masih bersifat materialistik karena yang dipersoalkan masih terbatas pada masalah materi yang mau dihasilkan dan yang mau dibagikan. Hal ini sebagai akibat penguasaan dan penerapan teori-teori pembangunan masih sangat didominasi oleh para ahli ekonomi. Parameter dan indikator-indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan masih menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Padahal pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu masalah materi yang mau dihasilkan serta dibagi dan masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangunan (Budiman, 2010:120). Para ahli ekonomi memang berbicara tentang sumber daya manusia (SDM), tetapi lebih menekankan aspek keterampilan sehingga manusia lebih dianggap

sebagai faktor produksi dan lebih ditekankan pada peningkatan produktivitas saja. Sebaliknya proses-proses yang terjadi dalam diri individu serta bagaimana menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya manusia kreatif kurang diperhatikan dan dipermasalahkan.

Urusan pembangunan bukan saja berhubungan dengan masalah produksi, serta distribusi barang material namun juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreativitasnya sebagai subjek pembangunan dan tidak sekadar sebagai objek pembangunan. Pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan sumber daya manusia, sehingga dihasilkan manusia-manusia yang kreatif dalam berbagai aspek seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, dan budaya, bukan hanya kreatif dalam aspek ekonomi saja.

Era otonomi daerah atau desentralisasi pembangunan yang lahir pasca reformasi di Indonesia, secara teoretis mestinya juga berimplikasi pada perubahan paradigma komunikasi pembangunan di Indonesia. Pergeseran perspektif komunikasi pembangunan dari model-model komunikasi vertikal-*top down* yang bersifat linear ke arah model-model komunikasi horisontal-partisipatif yang bersifat dialogis, yang secara perlahan dan terbatas telah dilakukan pada masa akhir rezim orde baru semestinya lebih dikembangkan lebih luas lagi pada era reformasi ini.

Pengembangan perspektif komunikasi penunjang pembangunan (*development support communication*) ke arah *social marketing* semestinya lebih ditingkatkan. Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat akhir-akhir ini merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan penggunaannya dalam merancang dan, menyosialisasikan arah kebijakan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Kemajuan teknologi komunikasi, terutama teknologi media, serta pemanfaatannya yang luas oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, secara teoretis akan lebih memudahkan masyarakat untuk memiliki akses pada sumber-sumber informasi. Maraknya penggunaan media sosial (jejaring sosial) sebagai sarana komunikasi antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan masyarakat luas dan sebaliknya merupakan peluang besar untuk mengoptimalkan pengimplementasian prinsip-prinsip *social marketing* dalam konteks pembangunan.

Kondisi seperti sekarang ini merupakan kesempatan emas untuk memulai mengoperasionalkan konsep pembangunan

yang tujuannya amat sangat abstrak (membangun manusia Indonesia seutuhnya) dengan lebih mengarahkan kebijakan pembangunan ke arah pemberdayaan masyarakat. Mari kita tengok paradigma pembangunan *'Another Development'* yang dikemukakan oleh Servaes (Nasution, 2008:76), yang pada dasarnya ingin menyempurnakan konsep-konsep pembangunan sebelumnya. Berlawanan dengan pandangan kaum modernis dan dependensi yang lebih berorientasi politik dan ekonomi, ide sentra paradigma *'Another Development'* adalah bahwa tidak ada suatu jalur tunggal yang universal dalam melaksanakan pembangunan. Menurut konsep ini, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang integral, multidimensional, dan dialektis yang dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Paradigma *'Another Development'* pada dasarnya berlandaskan pada Teori Penyadaran yang dikemukakan oleh Paulo Freire (Freire, 2014:34). Menurut Paulo Freire tujuan utama pembangunan adalah individu manusia yang memiliki karakteristik khas dengan segala idenya, dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya, yang memiliki rasa takut, kebencian, cinta, kebanggaan, perasaan yang mendalam hingga prasangka tertentu. Dalam pandangan Paulo Freire menjadi manusia sesungguhnya membina hubungan dengan sesama dan melakukan hubungan dengan dunia sekitar sebagai realitas objektif yang bersifat mandiri, intergritas dengan lingkungan berbeda dengan adaptasi, untuk itu ia mengatakan, "seseorang tidaklah utuh bila dia kehilangan kemampuan memilih, bila pilihannya adalah pilihan orang lain, dan bila keputusan-keputusannya berasal dari luar dan bukan merupakan keputusan sendiri". Seseorang yang beradaptasi disebabkan ia tidak mampu mengubah realitas.

2.4. Komunikasi Pembangunan Partisipatif

Istilah komunikasi pembangunan partisipatif (atau Kombangpar) merupakan persamaan dengan *Participatory Development Communication* yang telah dikenal sejak tahun 1990-an (Bessette dan Rajasunderam, 1996; Bessette, 2004; 2006). Konsep lain yang mendorong munculnya komunikasi pembangunan partisipatif adalah *Participatory Communication* atau *Participatory Communication for Social Change* (Servaes et al., 1996; Servaes, 2002a; Kim, 2005). Rajasunderam (1996) meyakini komunikasi pembangunan partisipatif adalah konsep yang berpotensi mampu mengurangi ketergantungan, mampu meningkatkan rasa percaya diri dan

kemandirian masyarakat itu sendiri. Lahirnya konsep Komunikasi Pembangunan Partisipatif diawali oleh perubahan kebijakan pembangunan, dimana awalnya memusatkan pada pertumbuhan ekonomi dan sekarang ini pusat pembangunan pada sumberdaya manusia yang awalnya di promosikan PBB dan kini sudah diadopsi secara luas. (Korten & Klaus, 1984; Cernea, 1988).

Menurut Beltran (2004), ada tiga konsepsi yang menonjol jika membicarakan hubungan antara komunikasi (sosial) dengan pembangunan nasional berdasarkan pengalamannya di Amerika Latin, yaitu:

1. Komunikasi Pembangunan (Development Communication)
Development communication merupakan komunikasi mengasumsikan media massa dapat mendorong perubahan sosial sebagai upaya mengubah masyarakat tradisional mejadi masyarakat yang melek teknologi dengan berbagai difusi dan inovasinya dimana pertumbuhan ekonomi adalah penyangganya.
2. Komunikasi Penunjang Pembangunan (Development Support Communication)
Development Support Communication merupakan pendekatan dirancang dan diorganisir baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pendekatan yang menjadi kunci pencapaian tujuan praktis dari pembangunan yang khusus.
3. "Alternative Communication for Democratic Development"
Komunikasi alternatif untuk pembangunan demokratis didasarkan asumsi bahwa komunikasi yang seimbang (komunikasi melalui media massa dan komunikasi interpersonal) akan meningkatkan akses informasi baik ke warga masyarakat ataupun dari warga masyarakat sehingga keberlanjutan pembangunan relative lebih terjamin. Disamping peningkatan pembangunan material, keadilan sosial dan kebebasan secara umum. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Beltran (1976) yang sebelumnya mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan baru dalam komunikasi berakar pada pemahaman komunikasi secara integral dan dinamis sebagai suatu proses dimana semua komponen harus diperhatikan secara seimbang.

Konsepsi komunikasi alternatif untuk pembangunan demokratis diatas adalah konsepsi yang memberi pengaruh tidak langsung dan sejalan dengan konsepsi Kombangpar. Bessette (2004) mengemukakan komunikasi

pembangunan partisipatif adalah kegiatan yang dirancang dengan pendekatan partisipatif dan penggunaan media komunikasi massa serta komunikasi interpersonal yang bertujuan untuk menjembatani dialog antara pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, dengan kata lain komunikasi pembangunan partisipatif merupakan seperangkat aktifitas yang berkontribusi dalam pencarian solusi yang mendapatkan dukungan semua pihak.

Proses partisipasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah partisipasi komunitas dengan melibatkan kelompok yang berbeda-beda dan bersama dengan kelompok kepentingan serta agen pembangunan yang bekerjasama dan melibatkan diri pada proses pengambilan keputusan pembangunan. Pada umumnya yang dimaksud dengan pemangku atau kelompok kepentingan antara lain komunitas (masyarakat) atau kelompok masyarakat yang aktif, aparat pemerintah baik lokal maupun regional, petugas teknis, LSM atau lembaga lain yang bekerjasama untuk pembangunan yang direncanakan dan hendak dilaksanakan.

Pergeseran peran juga terjadi dalam memaknai komunikasi yang awalnya terfokus pada memberi informasi, mempersuasi warga masyarakat untuk mengubah perilaku atau sikap pendapatnya menjadi fasilitasi kepada para pemangku kepentingan untuk pemecahan masalah bersama. Dengan demikian paradigma top-down, yang searah cenderung bersifat intruksi, tugas, komando menjadi pendekatan yang bersifat dialog, interaktif dan horizontal. Dimensi komunikasinya berpusat pada receiver (khalayak penerima) daripada kepada sender (sumber). Hal ini bisa terjadi karena yang menjadi awal pembuka proses komunikasinya tidak pada masalah pembangunan melainkan pada sasaran atau tujuan yang ditentukan bersama pada tingkat komunitas (Servaes & Malikhao, 2002).

Terjadinya perubahan pada makna komunikasi menimbulkan dampak pada peran komunikasi dimana peran komunikasinya menekankan aspek kebutuhan untuk membantu pada seluruh proses pertukaran informasi yang bersifat dialogis dan interaktif. Masyarakat sendiri seharusnya mampu melakukan identifikasi kebutuhan informasi yang sesuai. Warga masyarakat di tempatkan pada posisi setara dalam mengembangkan dan memproduksi media komunikasi. Dengan adanya komunikasi partisipatif diharapkan konflik antar kelompok, komunitas dan pemangku kepentingan dapat hilang atau setidaknya menjadi berkurang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan kajian literature atau studi pustaka dimana penulis mencari dan menganalisis berbagai tulisan yang relevan dengan masalah yang menjadi focus penulis, adapun studi literature ini dilaksanakan mulai bulan Januari-Maret 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Komunikasi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan ide dasar yang menjadikan diri subjek sebagai subjek yang memiliki daya kreasi dan inovasi dalam melaksanakan pembangunan dengan mendasarkan diri pada kemandirian. Sehubungan dengan hal tersebut maka proses pemberdayaan memiliki dua kemungkinan yaitu:

1. Konsep yang memberikan penekanan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebahagian kekuasaan yang dimiliki, sebagian kekuatan atau kemampuan yang dipunyai kepada warga masyarakat supaya anggota masyarakat atau individu bisa berdaya. Dalam poses ini dilengkapi dengan pembangunan asset yang bersifat material untuk mendukung kemandirian warga masyarakat itu sendiri.
2. Penekanan untuk proses stimuli yang mendukung atau memotivasi agar individu atau warga masyarakat punya kemampuan atau berdaya dalam menentukan pilihan hidup melalui proses yang dialogis.

Antara kedua proses tersebut saling terkait. Dalam prakteknya proses pembangunan hendaknya menempatkan masyarakat sebagai mitra relasi yang sejajar, masyarakat ditempatkan sebagai asset yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri. Perkembangan tentang konsep pembangunan dewasa ini adalah pembangunan *partisipatoris* dalam arti pembangunan yang mengajak rakyat terkait untuk mengatur diri sendiri, setiap golongan dalam masyarakat merupakan kekuatan-kekuatan potensial dalam mengaktualisasikan pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial.

Konsep utama pemberdayaan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek pembangunan, masyarakat bukan semata-mata sebagai objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan maka warga masyarakat adalah pemilik pembangunan dan sekaligus pelaksana pembangunan itu sendiri bahkan sebagai

pengawas dalam proses pembangunan yang sedang berjalan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada pola sebagai berikut:

- (a) Pembangunan yang dilaksanakan harus focus dan terarah (targeted)
Pembangunan harus berpihak dan ditujukan kepada pihak yang membutuhkan dan program pembangunan dirancang sebagai solusi atas masalah warga masyarakat dan memiliki kesesuaian dengan kebutuhannya.
- (b) Program pembangunan harus melibatkan warga masyarakat bahkan pelaksanaannya warga sendiri. Pelibatan warga masyarakat bertujuan agar proses bantuan berlangsung secara efektif dan efisien, juga meningkatkan warga masyarakat itu berdaya (empowering) baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya.
- (c) Penggunaan pendekatan kelompok karena pendekatan kelompok terbukti efektif dalam pemecahan masalah, apalagi pada kelompok miskin yang memiliki tingkat pendidikan relative rendah. Apalagi kalau masalah yang dihadapi bersifat kompleks menuntut pemecahan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta pengalaman yang memadai. Pendekatan kelompok mampu menyebarkan informasi pemecahan masalah secara efektif bagi anggota kelompok. (Pranaka:2006:98)

Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan melahirkan warga masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi sehingga potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Pada dasarnya di tiap daerah memiliki potensi yang baik sehingga bila diberdayakan maka potensi itu dapat berkembang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik serta melepaskan diri dari kemiskinan, ketergantungan hingga keterbelakangan.

Secara teoritis peran penting dalam pemberdayaan terletak pada masyarakat itu sendiri, hal itu terjadi karena masyarakat ditempatkan pada subjek pembangunan sekaligus juga subjek pemberdayaan itu sendiri. Karena itu sesungguhnya pemberdayaan tidak sepenuhnya tanggungjawab pemerintah. Menurut Robinson (1994) pemberdayaan merupakan proses pribadi/individual dan sosial/masyarakat, merupakan pembebasan kemampuan pribadi, suatu kompetensi dan kreatifitas serta kebebasan dalam tindakan. Pendapat Ife (1995) menyatakan pemberdayaan dengan mengacu pada kata “*empowerment*,” artinya memberikan daya, memberikan “*power*” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Payne (1997)

menyatakan pemberdayaan memiliki tujuan membantu *klien* memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan serta bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang sudah mendapatkan tujuan kolektif kemudian diberdayakan dengan sikap mandiri, lebih dari itu adalah kewajiban untuk pemberdayaan melalui usaha sendiri dan akumulasi pengetahuan, skill serta sumberdaya lainnya dalam pencapaian tujuan tanpa ketergantungan pada bantuan pertolongan pihak eksternal.

Tahapan pemberdayaan yang mampu menciptakan masyarakat dengan karakter mandiri, kreatif, inovatif perlu dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan dengan pelibatan atau partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Sehubungan dengan tujuan pemberdayaan Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk karakter individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemandirian pikiran, tindakan, dan pengendalian terhadap apa yang dilakukannya. Kemandirian masyarakat adalah kondisi yang ditandai oleh kemampuan dalam berpikir, memutuskan serta melaksanakan tindakan yang dianggap benar dalam rangka memecahkan masalah yang warga masyarakat hadapi dengan berdasar kemampuan yang mereka miliki. Kemampuan dalam konteks ini adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik atau mental. Kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir yang berdasar pada pengetahuan atau wawasan yang dimiliki sebagai solusi untuk pemecahan masalah yang dihadapinya. Kemampuan konatif adalah sikap yang terbentuk dari perilaku sensitive pada nilai pemberdayaan itu sendiri. Kemampuan psikomotorik adalah skill masyarakat sebagai keterampilan untuk mendukung masyarakat melakukan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kesimpulannya adalah pemberdayaan merupakan:

- a) Sebagai kemampuan dasar yang dapat berperan aktif dalam pembangunan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk kelompok masyarakat tertentu.
- b) Pemberdayaan mendorong kapasitas anggota masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

- c) Pemberdayaan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, yang memiliki ide, kreatifitas, pemiliki pembangunan itu sendiri.
- d) Pemberdayaan bisa membawa pengaruh pada perubahan sosial yang berskala besar dan luas, skala lokal, regional hingga global.
- e) Pemberdayaan mampu mengoptimalkan kemampuan warga masyarakat yang lemah dan tidak berdaya..

Program pemberdayaan yang dilakukan dan dirancang oleh pemerintah atau lembaga swasta lain agar kelompok masyarakat sekitar bantaran kali memiliki rasa percaya diri, mandiri, juga memiliki banyak hal-hal positif yang didapatkan seperti pengetahuan, keterampilan atau skill, motivasi, juga pekerjaan.

4.2. Strategi Pemberdayaan

Secara teoritis strategi pemberdayaan masyarakat sekitar bantaran sungai dapat dilakukan sebagai berikut:

1) *Memberikan Motivasi*

Warga masyarakat bisa mengerti dan memahami nilai kebersamaan dan solidaritas, interaksi sosial serta haknya sebagai warga Negara dan juga anggota masyarakat. Pembentukan kelompok perlu didorong karena kelompok merupakan mekanisme kelembagaan yang dapat mengorganisir dan menyelenggarakan aktifitas pengembangan masyarakat di wilayah desanya, kampungnya atau sekitar bantaran sungai. Kelompok-kelompok yang telah terbentuk ini selanjutnya diberikan motivasi agar berperan aktif dalam kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan kemampuan yang mereka miliki.

2) *Meningkatkan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan.*

Pencapaian kesadaran warga masyarakat bisa diperoleh melalui pendidikan dasar, Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, kemudian keterampilan yang bersifat vokasional dikembangkan dengan cara partisipatif. Pengetahuan yang biasanya diperoleh dari pengalaman bisa digabung dengan pengetahuan dari luar, kegiatan pelatihan yang mengkombinasikan pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengetahuan dari bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat bahwa sungai merupakan sumber mata pencaharian, sumber penghidupan sehingga kesadaran untuk rasa memiliki dan

rasa bertanggungjawab pada lingkungan sungai menjadi tumbuh kembang.

3) *Manajemen Diri.*

Kelompok yang terbentuk harus mampu menetapkan dalam memilih pemimpinnya. Kepemimpinan mengarahkan dan mengatur kegiatan sendiri, menyelesaikan konflik antara anggota kelompok, memelihara hubungan yang harmonis dan sinergitas antara anggota kelompok dalam proses pencapaian tujuan bersama.

Di tahapan awal proses pendampingan dari eksternal mungkin dibutuhkan agar mereka dapat memiliki pengetahuan dan pola dalam mengembangkan sebuah kelompok yang baik, dan pada akhirnya kewenangan kelompok sepenuhnya dimiliki sehingga proses penyetoran kelompok menjadi tanggungjawab bersama.

4) *Mobilisasi sumber.*

Ini adalah metode untuk menghimpun sumberdaya individual yang berkontribusi dalam mendapatkan modal sosial. Dasat pemikiran ini adalah pada dasarnya tiap orang punya kelebihan yang jika dipersatukan akan menjadi kekuatan luar biasa untuk peningkatan dan optimalisasi pemeliharaan lingkungan di sekitar bantaran sungai. Yang menjadi focus utama dalam melakukan penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumberdaya harus dilakukan secara cermat sehingga anggota masyarakat memiliki peluang yang sama.

5) *Pembangunan dan pengembangan jaringan.*

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat sehingga memiliki kemampuan dalam membangun, mempertahankan serta mengembangkan jaringan baik antara system sosial yang ada atau dengan system sosial yang lebih luas lagi. Akses terhadap berbagai sumberdaya memberikan peluang pada kelompok warga miskin untuk menjadi berdaya.

4.3. Strategi Pemberdayaan Kelompok di Sekitar Bantaran Sungai Citarum.

Strategi pemberdayaan kelompok di sekitar bantaran sungai dapat dilakukan dalam tiga level yaitu level mikro, level mezzo, dan level makro.

1. Level Mikro.

Pada level ini pelaksanaan pemberdayaan ditujukan kepada individu melalui pendekatan dan bimbingan. Bertujuan untuk memberikan bimbingan atau memberikan pelatihan dalam melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan kesadaran dan pemeliharaan sungai dan pelestarian lingkungan sungai serta sungai sebagai sumber penghidupan.

2. Level Mezzo
Pada level ini pelaksanaan pemberdayaan dilakukan pada kelompok, dimana pada level ini pemberdayaan dengan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Level mezzo berupa pemberian pendidikan dan pelatihan, solusi alternative melalui dinamika kelompok. Pendekatan kelompok merupakan strategi dalam upaya peningkatan kesadaran, penambahan wawasan dan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Level Makro.
Pada level ini yang menjadi sarannya adalah perubahan yang lebih besar dan lebih luas. Rancangan kebijakan sosial pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik merupakan strategi dalam pendekatan level makro. Dalam level ini individu diasumsikan sebagai orang yang memiliki kompetensi dalam situasi tertentu, menetapkan pilihan strategi serta bertindak sesuai dengan kondisi yang ada. (Harun, Elvinaro Ardianto: 2015:46)

Pendekatan pemberdayaan yang menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pola pelaksanaan pemberdayaanya adalah menggunakan pendidikan dan pelatihan, solusi pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya pengembangan sumberdaya manusia utamanya dalam penambahan kemampuan intelek dan kepribadiannya. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah peningkatan kepribadian serta motivasi mengabdikan kepada lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Peningkatan mutu serta kemampuan keterampilan baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam memimpin.

Solusi alternative pemecahan masalah dengan menggunakan dinamika kelompok, dengan adanya interaksi antar anggota kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung terjadi proses “memberi” dan “menerima” dalam hubungan yang timbal balik artinya perilaku warga satu berpengaruh kepada perilaku warga lainnya. Tujuannya tumbuh kembang solidaritas, pemahaman yang sama terhadap lingkungan sungai mulai dari kebersihannya, kebermanfaatannya, fungsinya, hingga kelestarian sungai sebagai sumber penghidupannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Kata pemberdayaan memberikan kesan tangguh, kuat, handal dalam kenyataannya konsep pemberdayaan merupakan “bahasa pertolongan” yang disampaikan dalam symbol atau lambang yang bermakna sebagai kekuatan, ketangguhan yang dapat mengubah diri sendiri, pihak lain disekitar serta warga masyarakat disekelilingnya.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah ikhtiar peningkatan harkat, martabat warga masyarakat sehingga terbebas dari kemiskinan serta keterbelakangan.

5.2. Saran

1. Pemberdayaan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari level atas hingga level bawah mulai pejabat pusat hingga pejabat RT setempat.
2. Bukan hanya komitmen semata tapi lebih dari itu adalah keberlangsungan kegiatan serta kesukarelaan seluruh warga dalam menjalankan kegiatannya dalam program sungai yang bersih, Citarum yang Harum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 2010. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Depari, Eduard dan Collin McAndrew. 2011. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Effendy, Onong Uchjana. 2009. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: P.T. Remaja Karya.
- Freire, Paulo. 2014. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Harun, Rochajat, H. dan Elvinaro Ardianto. 2015. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jahi, Amri (Penyunting). 2013. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Jayaweera, Neville dan Sarath Anumugama. 2007. *Rethinking Development Communication*. Singapore: AMIC.
- Hikmat Harry, Kusnaka Adimihardja, 2001, *Pembangunan Partisipatif*, Bandung, Rosdakarya

- Nasution, Zulkarimen. 2008. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Rogers, Everett M. (Editor). 2009. *Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis*. Penerjemah: Dasmur Nurdin. Jakarta: LP3ES.
- Pranaka, A.M.W., dan Onny S. Priyono, (eds.). 2006. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Soekanto, Soerjono. 1990. "Sosiologi Suatu Pengantar". Raja Grafindo Persada, Jakarta.